



**PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN**

**TAHUN
2025**

DINAS KESEHATAN

Jalan Gajah Mada No. 19, Purwodadi



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Gajah Mada Nomor 19, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421049, Faksimile (0292) 424852
Laman dinkes.grobogan.go.id, Pos-el dinkes@grobogan.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, 2 Februari 2026

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan

dr. DJATMIKO, M.A.P.
Pembina Tk. I / IVb
Nip-197110012006041017



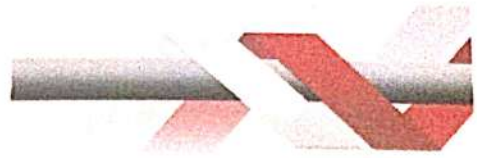
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.



Purwodadi, 2 Februari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN



dr. DJATMIKO, M.A.P.

Pembina Tk. I / IVb

NIP. 197110012006041017



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Pengukuran Kinerja	36
B. Capaian Kinerja Organisasi	38
1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2025	39
2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.	40
3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra	42
4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten sekitar	44
5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan	45
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	46
C. Realisasi Anggaran	53
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN	59
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	59
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	60

BAB I

PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan mempunyai tugas: melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

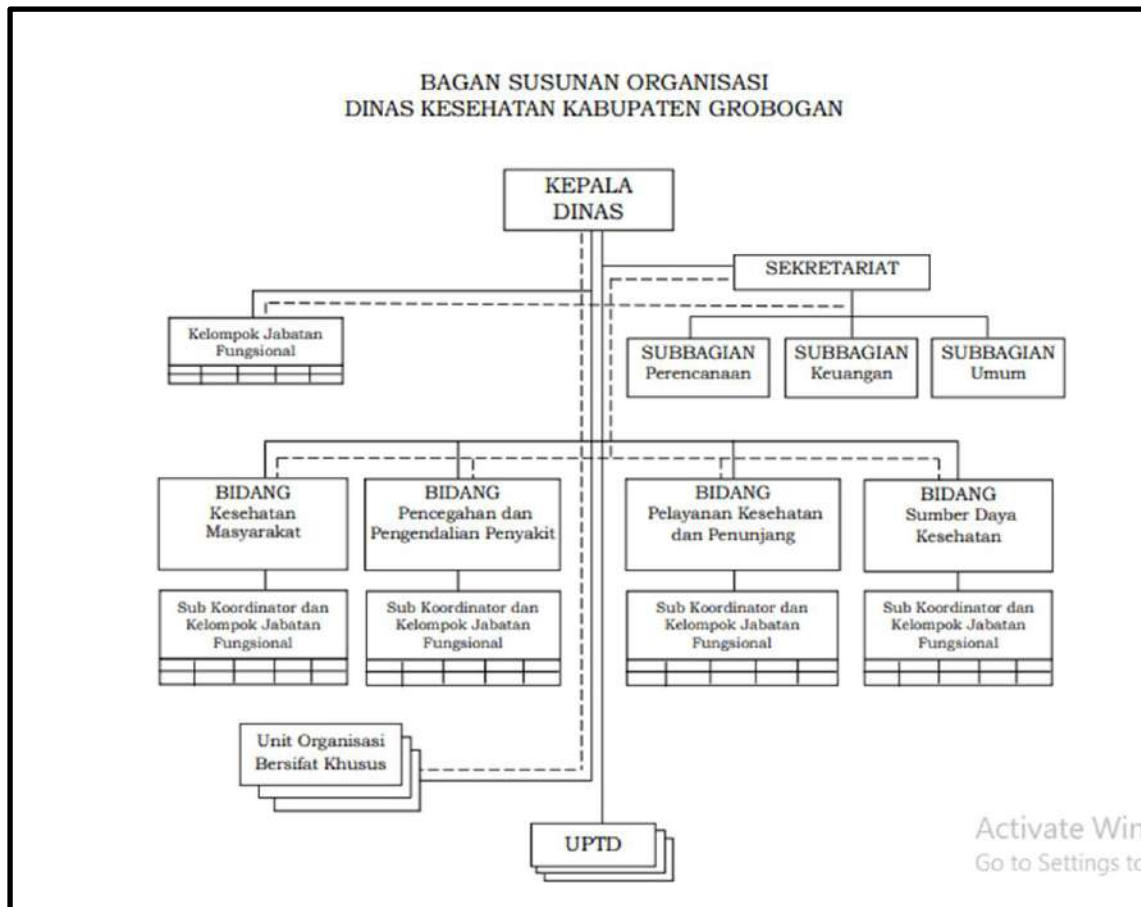
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesehatan;
- Pengoordinasian, Pengembangan dan Fasilitasi Kegiatan di Bidang Kesehatan;
- Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan di Bidang Kesehatan;
- Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan di Bidang Kesehatan;
- Pengelolaan Kesekretariatan Dinas;
- Pengelolaan UPTD, dan;
- Pelaksanaan Fungsi Kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 sebagai berikut :



1. Masih tingginya angka kematian Ibu dan angka kematian bayi; Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan yaitu sebesar 120,05 per 100.000 KH pada tahun 2022 dan 117,51 per 100.000 KH pada tahun 2023, dan mengalami kenaikan menjadi 128,01 per 100.000KH pada tahun 2024 Angka kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Grobogan terjadi penurunan dari 12,94 per 1.000 4 KH pada tahun 2022 , menjadi 12,67 per 1.000 KH pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 14,69 per 1.000 KH pada tahun 2024;
2. Masih kurangnya mutu pelayanan baik sarana, prasarana maupun sumber daya kesehatan;
3. Sarana dan prasarana kesehatan baik rujukan, maupun dasar secara kuantitas telah mencukupi namun secara kualitas belum optimal;
4. Masih ditemukannya gizi buruk pada anak usia bawah lima tahun atau kategori tertentu. Capaian Prevalensi gizi buruk tahun 2022 sebesar 0,03 meningkat menjadi 0,07 di tahun 2023 dan 0,17 di tahun 2024.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan hal ini dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABa),
2. Belum optimalnya pencapaian Keluarga Sehat;
3. Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular;
4. Belum optimalnya kualitas fasilitas kesehatan dasar dan rujukan
5. Belum tercapainya SPM di bidang kesehatan;
6. Belum optimalnya tata kelola manajemen dalam pelaksanaan good governance;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
8. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)



tahun. Di dalam Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
- Misi 2 : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana
- Misi 3 : Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 4 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat
- Misi 5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan



untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			Usia Harapan Hidup	74,92	75,02	75,14	75,22	75,3
		1.1	Meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KH)	230,29 (50 Kasus)	182,28 (40 Kasus)	160,80 (35 Kasus)	146,74 (32 Kasus)	137,36 (30 Kasus)
				Angka Kematian Bayi	13,03 (293 Kasus)	12,67 (278 Kasus)	12,54 (273 Kasus)	12,29 (268 Kasus)	12,04 (263 Kasus)
				Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita	14,5	14,3	14	14	14
		1.2	Meningkatkan Kualitas Fasilitas Kesehatan Rujukan	Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	60	65	65	65	65



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Nilai SAKIP	BB (70,20)	BB (70,23)	BB (70,25)	BB (72)	BB (73,5)
			Nilai IKM	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,20)	B (79,70)
		2.1	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik di dukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang Baik	BB (70,20)	BB (70,23)	BB (70,25)	BB (72)	BB (73,5)
			Nilai IKM	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,20)	B (79,70)

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis



perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1.1. Usia Harapan Hidup	Tahun	Usia Harapan Hidup adalah rata – rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia Harapan Hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.	Rumus : Dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (age spesifik death rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun – tahun.	BPS
1.1	Meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita	1. Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KH)	Per 100.000	Kematian Ibu adalah Kasus kematian seorang perempuan yang di	Rumus : Jumlah Kematian ibu di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama x 100.000	KEMENKES



					akibatkan oleh proses yang berhubungan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola) dan dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian incidental		
		2.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000	Kematian Bayi adalah Kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai belum berusia tepat 1 tahun di suatu	Rumus : Jumlah kematian bayi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah Kelahiran Hidup pada periode waktu yang sama x 1.000	KEMENKES



					wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.		
		3.	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan Indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD (Standart Deviasi)	Rumus : Jumlah Balita Pendek / Jumlah Balita yang diukur panjang/tinggi badan x 100	KEMENKES
1.2	Meningkatkan Kualitas Fasilitas Kesehatan Rujukan	1.	Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	%	Akreditasi RS adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan RS setelah dilakukan penilaian bahwa RS telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit. Akreditasi yang dibutuhkan	Rumus : Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi / Jumlah RS di kabupaten/kota x 100 %	KEMENKES



					minimal utama. Cakupan perhitungan rumah sakit negeri dan swasta. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.		
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1.	Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP adalah Hasil aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah	hasil evaluasi komprehensif terhadap komponen manajemen kinerja (perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja), di mana setiap komponen memiliki bobot dan penilaian angka untuk menghasilkan nilai total (maksimal 100), yang kemudian dikategorikan menjadi predikat seperti "Sangat Baik," "Baik," atau "Cukup," merujuk pada Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 dan pedoman teknis terkait.	INSPEKTORAT
		2.	Nilai IKM	Nilai	Nilai IKM adalah hasil penilaian masyarakat yang	Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner formulir secara daring yang disebarakan kepada pengguna	PENILAIAN MANDIRI



					Mendapatkan layanan di perangkat daerah Dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan oleh KemenPAN-RB	layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	
2.1	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik di dukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang Baik	1.	Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP adalah Hasil aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah	hasil evaluasi komprehensif terhadap komponen manajemen kinerja (perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja), di mana setiap komponen memiliki bobot dan penilaian angka untuk menghasilkan nilai total (maksimal 100), yang kemudian dikategorikan menjadi predikat seperti "Sangat Baik," "Baik," atau "Cukup," merujuk pada Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 dan pedoman teknis terkait.	INSPEKTORAT
		2.	Nilai IKM	Nilai	Nilai IKM adalah hasil penilaian masyarakat yang	Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner formulir secara daring yang disebarakan kepada pengguna	PENILAIAN MANDIRI



					Mendapatkan layanan di perangkat daerah Dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan oleh KemenPAN-RB	layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2025

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			Usia Harapan Hidup	Tahun	75,22
		1.1	Meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KH)	Per 100.000	146,74 (32 Kasus)
				Angka Kematian Bayi	Per 1.000	12,29 (268 Kasus)
				Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	14
		1.2	Meningkatkan Kualitas Fasilitas Kesehatan Rujukan	Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	%	65
2	Meningkatkan			Nilai SAKIP	Indeks	BB (72)

	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas					
				Nilai IKM	Nilai	B (78,20)
		2.1	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik di dukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP	Nilai	BB (72)
				Nili IKM	Nilai	B (78,20)

Sumber: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal

15 bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,22
1.1	Meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita	1. Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KH)	Per 100.000	146,74 (32 Kasus)
		2. Angka Kematian Bayi	Per 1.000	12,29 (268 Kasus)
		3. Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	14
1.2	Meningkatkan Kualitas Fasilitas Kesehatan Rujukan	Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	%	65
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai SAKIP	Indeks	BB (72)
		Nilai IKM	Nilai	B (78,20)
2.1	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik di	Nilai SAKIP	Nilai	BB (78,20)

	dukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang Baik				
			Nilai IKM	Nilai	BB (72)

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akutansi Publik	100 %	457.168.632.000
		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100 %	
		Persentase Pemenuhan Dokumen Penilaian Manajemen Risiko	100 %	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang disusun sesuai Pedoman yang Berlaku	100 %	436.811.600

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	100 %	190.476.213.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	0
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 %	50.000.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.191.259.000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia Sesuai Kebutuhan	100 %	0
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Tersedia Sesuai Kebutuhan	100 %	927.040.000
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	836.736.000
1.9	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 %	239.475.000.000
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Daya Tampung Rujukan Terhadap Jumlah Penduduk	0,09	170.920.709.500
		Persentase Capaian Hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100 %	
		Prevalensi Wasting (kurus dan sangat kurus) pada Balita	4%	
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan	75 Unit	73.196.696.615

	untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan UKP dan UKM yang Tersedia		
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Layanan UKM dan UKP yang di berikan	82 %	97.404.402.585
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Kesehatan yang dikelola	6 Jenis	316.327.900
2.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehtana Tingkat Daerah	11 Unit	3.282.400
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar	93,33 %	189.965.500
		Persentase Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai Kebutuhan	70,55 %	
3.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang mempunyai Izin	95 %	0
3.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	0
3.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	57,5 %	189.965.500

	Kabupaten/Kota			
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi Standard an Persyaratan Perizinan	70 %	502.131.000
		Persentase Industri Rumah Tangga yang mempunyai Izin	65 %	
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi Syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	80 %	
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Berizin	75 %	166.562.500
4.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minumana Tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minumana Tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga	84 Sarana	154.170.000
4.3	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan	48 Buah	35.000.000

	Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
4.4	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	90 Buah	0
4.5	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga yang diperiksa dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	34 Unit	146.398.500
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Mandiri	48 Desa	1.419.180.000
5.1	Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Sasaran Advokasi dan Kemitraan	67 Unit	0
5.2	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sasaran Promosi	62.000 Unit	0
5.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dibina	1.047 Unit	1.419.180.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal Empat bulan September tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan terjadi pergantian atau mutasi pejabat dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,22
1.1	Meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita	1. Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KH)	Per 100.000	146,74 (32 Kasus)
		2. Angka Kematian Bayi	Per 1.000	12,29 (268 Kasus)
		3. Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	14
1.2	Meningkatkan Kualitas Fasilitas Kesehatan Rujukan	Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	%	65
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai SAKIP	Indeks	BB (72)
		Nilai IKM	Nilai	B (78,20)
2.1	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan	Nilai SAKIP	Nilai	BB (78,20)

	Kualitas Pelayanan Publik di dukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang Baik				
			Nilai IKM	Nilai	BB (72)

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupataen Grobogan Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akutansi Publik	100 %	475.662.883.617
		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100 %	
		Persentase Pemenuhan Dokumen Penilaian Manajemen Risiko	100 %	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang	100 %	436.811.600

		disusun sesuai Pedoman yang Berlaku		
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	100 %	190.476.213.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	0
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 %	50.000.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.191.259.000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia Sesuai Kebutuhan	100 %	0
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Tersedia Sesuai Kebutuhan	100 %	947.730.000
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	829.748.000
1.9	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 %	280.731.122.017

2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Daya Tampung Rujukan Terhadap Jumlah Penduduk	0,09	178.097.732.375
		Persentase Capaian Hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100 %	
		Prevalensi Wasting (kurus dan sangat kurus) pada Balita	4%	
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM yang Tersedia	75 Unit	91.176.324.450
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Layanan UKM dan UKP yang di berikan	82 %	86.838.295.525
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Kesehatan yang dikelola	6 Jenis	0
2.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehtana Tingkat Daerah	11 Unit	83.112.400
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar	93,33 %	1.121.099.700
		Persentase	70,55 %	

		Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai Kebutuhan		
3.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang mempunyai Izin	95 %	0
3.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	60.172.700
3.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	57,5 %	1.060.927.000
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi Standard an Persyaratan Perizinan	70 %	305.732.000
		Persentase Industri Rumah Tangga yang mempunyai Izin	65 %	
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	80 %	

		memenuhi Syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)		
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Berizin	75 %	148.397.750
4.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minumana Tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minumana Tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga	84 Sarana	0
4.3	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	48 Buah	31.256.000

4.4	Penerbitan Stiker pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penerbitan Stiker pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	90 Buah	0
4.5	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga yang diperiksa dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	34 Unit	126.078.250
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Mandiri	48 Desa	308.966.600
5.1	Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Sasaran Advokasi dan Kemitraan	67 Unit	0
5.2	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sasaran Promosi	62.000 Unit	0
5.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dibina	1.047 Unit	308.966.600

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah (negatif), maka digunakan rumus :

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatk an Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,22	72,94	96,96 %	Sangat Tinggi	BPS
1.1	Meningkatk an Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KH)	146,74 (32 Kasus)	83,71 (13 Kasus)	142,96 %	Sangat Tinggi	Kemenkes (Aplikasi MPDN)
		Angka Kematian Bayi	12,29 (268 Kasus)	9,98 (155 Kasus)	118,79 %	Sangat Tinggi	Kemenkes (Aplikasi MPDN)
		Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita	14 %	8,48 %	128,71 %	Sangat Tinggi	SSGI
1.2	Meningkatk an Kualitas Fasilitas Kesehatan Rujukan	Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	65 %	92,33 %	142,04 %	Sangat Tinggi	RS Online
2.	Meningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai SAKIP	BB (72)	BB (71,50)	99,3 %	Sangat Tinggi	Inspektorat
		Nilai IKM	B (78,20)	B (82,77)	105,84 %	Sangat Tinggi	Penilaian Mandiri

2.1	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik di dukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP	BB (72)	BB (71,50)	99,3 %	Sangat Tinggi	Inspektorat
		Nilai IKM	B (78,20)	B (82,77)	105,84 %	Sangat Tinggi	Penilaian Mandiri

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, bahwa Tahun 2025 capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 capaiannya sebesar 97% dengan kategori Sangat Tinggi, dengan capaian indikator kinerja sasaran 1.1 mencapai 100 % atau kategori Sangat Tinggi dan capaian kinerja sasaran 1.2 mencapai 100 % atau kategori Sangat Tinggi. Maka rata-rata capaian sasaran pada Tujuan 1 mencapai 100 %, dengan kategori Sangat Tinggi

Sedangkan Indikator Kinerja 1 Tujuan 2 capaiannya sebesar 99,31% dengan kategori Sangat Tinggi, dan capaian indikator kinerja 2 Tujuan 2 capaiannya 100 % dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan Indikator kinerja 1 sasaran 2.1 mencapai 99,31 % atau kategori Sangat Tinggi dan capaian indikator kinerja 2 sasaran 2.1 mencapai 100 % atau kategori Sangat Tinggi. Maka rata-rata capaian sasaran pada Tujuan 2 mencapai 99,65 %, dengan kategori Sangat Tinggi.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,02	75,04	100,2 %	75,14	75,25	100,14 %	75,22	72,94	96,96 %
1.1	Meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KH)	182,28 (40 Kasus)	117,51 (22 Kasus)	135,53 %	160,80 (35 Kasus)	128,01 (21 Kasus)	129,19 %	146,74 (32 Kasus)	83,71 (13 Kasus)	142,96 %
		Angka Kematian Bayi	12,67 (278 kasus)	14,10 (264 Kasus)	88,88 %	12,54 (273 kasus)	14,69 (241 Kasus)	82,85 %	12,29 (268 Kasus)	9,98 (155 Kasus)	118,79 %
		Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita	14,3 %	5,87 %	157,51 %	14 %	7,48 %	146,57 %	14 %	8,48 %	128,71 %
1.2	Meningkatkan Kualitas Fasilitas Kesehatan Rujukan	Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	60	83,33 %	138,88 %	65	91,67 %	141,03 %	65 %	92,33 %	142,04 %
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai SAKIP	BB (70,23)	BB (73,5)	104,65 %	BB (70,25)	BB (72)	102,49 %	BB (72)	BB (71,50)	99,3 %
		Nilai IKM	B (76,70)	B (79,7)	103,91 %	B (77,70)	B (86,5)	113,89	B (78,20)	B (82,77)	105,84 %
2.1	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik di dukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP	BB (70,23)	BB (73,5)	104,65 %	BB (70,25)	BB (72)	102,49	BB (72)	BB (71,50)	99,3 %
		Nilai IKM	B (76,70)	B (79,7)	103,91 %	B (77,70)	B (86,5)	113,89	B (78,20)	B (82,77)	105,84 %

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tujuan 1 tahun sebelumnya menunjukkan negative yang dibuktikan adanya penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya, tahun 2022 100,2 % turun menjadi 100,14 % di tahun 2023 dan tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 96,96 %. Selanjutnya, capaian kinerja sasaran 1 dan indikator sasaran 1.1 dan 1.2 juga mengalami kenaikan setiap tahunnya..

Sedangkan capaian indikator sasaran 2.1 menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, tahun 2022 mencapai 104,65%, turun menjadi 102,49 % pada tahun 2023 dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2025 menjadi 99,3%, sedangkan capaian indikator sasaran 2.2 menunjukkan peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun, capaian indikator kinerja sasaran 103,91 % pada tahun 2023, naik menjadi 113,89 % di tahun 2024 dan menunjukkan penurunan di tahun 2025 menjadi 105,84 %.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4

Tingkat Kemajuan Capaian Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	72,94	75,3	96,86 %
1.1	Meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KH)	83,71 (13 Kasus)	137,36 (30 Kasus)	60,94 %
		Angka Kematian Bayi	9,98 (155 Kasus)	12,04 (263 Kasus)	82,89 %

		Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita	8,48 %	14	60,57 %
1.2	Meningkatkan Kualitas Fasilitas Kesehatan Rujukan	Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	92,33 %	65	142 %
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai SAKIP	BB (71,50)	BB (73,5)	97,27 %
		Nilai IKM	B (82,77)	B (79,70)	103,85 %
2.1	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik di dukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP	BB (71,50)	BB (73,5)	97,27 %
		Nilai IKM	B (82,77)	B (79,70)	103,85 %

Dari analisis tabel di atas, bahwa tingkat kemajuan capaian kinerja Tahun 2025 pada indikator kinerja Tujuan 1 mencapai 96,86 %, sehingga untuk potensi mencapai target jangka menengah pada tahun 2026 sangat mungkin tercapai, sedangkan untuk tingkat kemajuan indikator kinerja sasaran 1.1 indikator AKI mencapai 60,94 %, AKB mencapai 82,89 % dan Prevalensi Stunting mencapai 60,7 %, sedangkan tingkat kemajuan indikator kinerja sasaran 1.2 mencapai 142 %.

Sedangkan untuk tingkat kemajuan indikator kinerja sasaran 2.1 untuk Nilai SAKIP mencapai 97,27 % dan Nilai IKM 103,85 % sehingga untuk mencapai target jangka menengah memerlukan percepatan dalam pencapaiannya.

4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten sekitar

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten lain diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Grobogan

No.	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja Kabupaten			Persentase capaian	
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional
1	Usia Harapan Hidup	72,94	75,24	74,47	103,15 %	102,09 %

Dari tabel di atas, capaian kinerja Tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian provinsi, capaian kinerja provinsi lebih tinggi dari capaian kabupaten dengan persentase 103,15%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian nasional, capaian kinerja kabupaten lebih rendah dari capaian nasional dengan persentase 102,9 %.

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Kabupaten			Persentase capaian	
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional
1	Usia Harapan Hidup	72,94	75,24	74,47	103,15 %	102,09 %
2	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	83,71 (13 Kasus)	Nihil	Nihil	-	-
3	Angka Kematian Bayi	9,98 (155 Kasus)	Nihil	Nihil	-	-
4	Prevalensi Stunting	8,48 %	19,8 %	17,1 %	233,49 %	201,65 %
5	Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	92,33 %	Nihil	Nihil	-	-

Sebagaimana Tabel di atas, bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama ada yang dapat di lakukan perbandingan dan ada yang tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja di tingkat provinsi/nasional, dikarenakan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan ada yang di lakukan pengukuran kinerja di

tingkat Provinsi/Nasional dan ada yang tidak dilakukan pengukuran kinerja di tingkat Provinsi/Nasional.

*) silakan dinarasikan sesuai kondisi capaian kinerjanya masing-masing. (ini hanya contoh narasi)

5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Sesuai hasil analisis capaian kinerja di atas, faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja level tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,22	72,94	96,96 %	Berhasil	
1.1	Meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KH)	146,74 (32 Kasus)	83,71 (13 Kasus)	142,96 %	Berhasil	
		Angka Kematian Bayi	12,29 (268 Kasus)	9,98 (155 Kasus)	118,79 %	Berhasil	
		Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita	14 %	8,48 %	128,71 %	Berhasil	
1.2	Meningkatkan Kualitas Fasilitas	Persentase Rumah	65 %	92,33 %	142,04 %	Berhasil	

	Kesehatan Rujukan	Sakit Rujukan Terakreditasi					
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai SAKIP	BB (72)	BB (71,50)	99,3 %	Berhasil	
		Nilai IKM	B (78,20)	B (82,77)	105,84 %	Berhasil	
2.1	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik di dukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP	BB (72)	BB (71,50)	99,3 %	Berhasil	
		Nilai IKM	B (78,20)	B (82,77)	105,84 %	Berhasil	

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	75,22	72,94	96,96 %	179.833.530.675	164.158.833.646	91,2%	1,06%	174.438.524.754,75	15.674.697.029	Efisien
1.1	Meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita										
	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KH)	146,74 (32 Kasus)	83,71 (13 Kasus)	142,96 %							
	Angka Kematian Bayi	12,29 (268 Kasus)	9,98 (155 Kasus)	118,79 %							
	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada	14 %	8,48 %	128,71 %							
1.2	Meningkatkan Kualitas Fasilitas Kesehatan Rujukan	65 %	92,33 %	142,04 %							
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	120	120%	475.662.883.617	439.578.922.181	92,41 %	1,29%	570.795.460.340,4	36.083.961.436	Efisien
2.1	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik di dukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang Baik										
	Nilai SAKIP	BB (72)	BB (71,50)	99,3 %							

	Nilai IKM	B (78,20)	B (82,77)	105,84 %							
--	-----------	--------------	--------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	96,96 %				Menunjang
1.1	Meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KH)	142,96 %	Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk	1.225,55 %	Menunjang
		Angka Kematian Bayi	118,79 %		Presentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	96,20 %	Tidak Menunjang
		Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita	128,71 %		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	46 %	Tidak Menunjang
1.2	Meningkatkan Kualitas Fasilitas Kesehatan Rujukan	Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	142,04 %	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan UKP dan UKM yang tersedia	100 %	Menunjang

				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jenis layanan kesehatan UKM dan UKP yang diberikan	100 %	Menunjang
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah data dan informasi kesehatan yang dikelola	100 %	Menunjang
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	100 %	Menunjang
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	96,43 %	Tidak Menunjang
					Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai kebutuhan	100 %	Menunjang
				Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang mempunyai Izin	100 %	Menunjang
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	Menunjang
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	92,74 %	Menunjang

				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	107,14 %	Menunjang
					Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	100 %	Menunjang
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Presentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin	100 %	
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0	Tidak Menunjang
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	243,75 %	Menunjang
				Pemeriksaan dan Tindak	Jumlah industri rumah tangga yang	158,82 %	Menunjang

				Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	diperiksa dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	100 %	Menunjang
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok sasaran advokasi dan kemitraan	100 %	Menunjang
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dibina	100 %	Menunjang
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai SAKIP	99,3 %				Menunjang
		Nilai IKM	105,84 %				Menunjang
2.1	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kulaitas Pelayanan Publik di dukung dengan Manajemen Administrasi	Nilai SAKIP	99,3 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100 %	Menunjang

	Perkantoran Pemerintahan yang Baik						
		Nilai IKM	105,84 %		Cakupan Pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	Menunjang
					Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	100 %	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai Pedoman yang Berlaku	100 %	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	100 %	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya	100 %	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	100 %	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia sesuai kebutuhan	100 %	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Persentase Barang Milik Daerah dalam	100 %	Menunjang

				dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kondisi Baik		
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 %	Menunjang

Dari analisis program/kegiatan di atas, bahwa terdapat 5 program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, dan terdapat 3 Indikator Program yang tidak menunjang. Dari 21 kegiatan yang telah dilaksanakan, 20 kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dan terdapat 1 kegiatan yang tidak menunjang.

C. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	178.097.732.375	162.551.341.542	91,27 %
1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	91.176.324.450	83.038.409.944	91,07 %
1.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.838.295.525	79.444.697.198	91,49 %
1.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	0	0	0
1.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.112.400	68.234.400	82,10 %
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.121.099.700	1.090.959.787	97,31 %
2.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan	60.172.700	33.757.241	56,10 %

	UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
2.2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.060.927.000	1.057.202.546	99,65 %
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	305.732.000	271.766.317	88,89
3.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	148.397.750	138.045.457	93,02 %
3.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0	0	0
3.3	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	31.256.000	28.022.000	89,65 %
3.4	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	126.078.250	105.698.860	83,84 %
3.5	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0	0	0
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	308.966.600	244.766.000	79,22 %
4.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
4.2	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	308.966.600	244.766.000	79,22

	(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	475.662.883.617	439.578.922.181	92,41
5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	436.811.600	341.403.024	78,16 %
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	190.476.213.000	185.457.768.848	97,37 %
5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	47.402.900	94,81 %
5.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.191.259.000	1,776,921.061	81,09 %
5.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
5.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	947.730.000	784.170.140	82,74 %
5.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	829.748.000	807.858.929	97,36 %
5.8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
5.9	Peningkatan Pelayanan BLUD	280.731.122.017	250.363.397.279	89,18 %

BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 2 tujuan, 3 sasaran dengan 9 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 96,96% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 142,96% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 118,79% (kategori Sangat Tinggi)
- Tujuan 2 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 128,71% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 142,04% (kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 655.496.414.292 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 603.737.755.827, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 92,10 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 7,9 %.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, 2 Februari 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN



dr. DJATMIKO, M.A.P
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 197110012006041017

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS KESEHATAN

Jalan Gajah Mada Nomor 19, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421049, Faksimile (0292) 424852

Laman dinkes.grobogan.go.id, Pos-el dinkes@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR: 800 / 20 / DINKES / 2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten ,serta memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai dasar perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja,
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 12 Januari 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Grobogan



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 800 / 20 / DINKES / 2026

TANGGAL : 12 JANUARI 2026

1. Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan : Bidang Kesehatan
3. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
4. Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan;
c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesehatan
d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan;
e. Pengelolaan kesekretaritan Dinas;
f. Pengelolaan UPTD dan;
g. Pelaksanaan Fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN



dr. DJATMIKO, M.A.P
Pembina Tingkat I / IVb
NIP.19711001 200604 1 017

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 800 / 20 / DINKES / 2026
NOMOR 800 / 20 / DINKES / 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	Tahun						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas keluarga	Usia Harapan Hidup	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu	Tahun	75,28	75,67	76,05	76,44	76,82	77,21	BPS
2.	Meningkatnya Kualitas Upaya Kesehatan Masyarakat	Kasus Kematian Ibu	Jumlah kematian perempuan akibat sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperburuk oleh kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk sebab	Kasus	20	19	18	17	17	16	KEMENKES

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	Tahun						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	sesuai Siklus Hidup		kecelakaan atau insidental), yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah kehamilan berakhir tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan. dalam kurun waktu 1 tahun								
3.		Angka Kematian Balita	Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.	Per 1.000 KH	16,43	15,93	15,70	15,37	15,02	14,67	KEMENKES
4.		Angka Bebas Penyakit Menular	Jumlah Puskesmas yang mencapai eliminasi malaria dan cakupan ODHIV ditemukan dan mulai pengobatan ARV minimal 90%, serta angka keberhasilan pengobatan TBC > 90% , mengalami penurunan angka kematian dengue, mencapai eliminasi kusta, melakukan pencegahan hepatitis virus DIBAGI jumlah puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	KEMENKES

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	Tahun						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			DIKALI 100%								
5.		Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	Jumlah Puskesmas dengan indeks SPM Hipertensi dan Diabetes Mellitus paling kurang 80% serta memiliki peraturan KTR dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	KEMENKES

)*Sumber data diisi instansi / unit kerja yang memberi nilai

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN



dr. DJATMIKO, M.A.P
Pembina Tingkat I / IVb
NIP.19711001 200604 1 017

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SOLECH, SKM, M. Kes
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. DJATMIKO, M.A.P
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

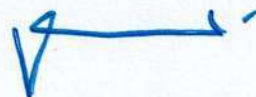
Purwodadi, 22 Januari 2026

Pihak Kedua,



dr. DJATMIKO, M.A.P
Pembina Tk. I / IVb
NIP 197110012006041017

Pihak Pertama,



MUHAMMAD SOLECH, SKM, M. Kes
Pembina Tk. I / IVb
NIP 197104071994031003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasyankes memiliki Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar	77 %
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) terakreditasi Paripurna	80 %
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)	70 %
		Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	70 %
		Cakupan ANC Sesuai Standar 12 T	100 %
		Jumlah Kematian Bayi	231 %
		Prevalensi Wasting	6,4 %
		Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	92 %
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	97 %
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	84
		Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100
		Persentase Depresi yang mendapatkan layanan	1,5
		Persentase merokok penduduk usia 10-21 Tahun	4,99
		Persentase Obesitas	19,15
		Persentase Puskesmas dan Pustu yang menyelenggarakan peningkatan aktifitas fisik	55
		Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	77
a.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di Rehap (Puskesmas, RSUD dan Fasilitas Kesehatan Lainnya)	8
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di fasilitasi Pengadaan Alkes, Bahan Medis Habis Pakai , dan Obat (RSUD, Puskesmas dan Faskes Lainnya)	34

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026 Target Tahun 2026
b.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Layanan Kesehatan Keluarga Sesuai Standar	
		Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat Promosi Kesehatan	100
		Persentase Sasaran PTM (Hipertensi, DM, ODMK, ODGJ, Napza) yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100
		Jumlah Orang yang memiliki Risiko Tinggi Penyakit Menular (TBC, HIV, DBD, Malaria, Hepatitis, Kusta) yang mendapat Pelayanan Sesuai Standar	100
		Cakupan Penemuan Kasus TB	59.471
		Jumlah Bayi, Baduta, Ibu Hamil, Anak Sekolah (SD), WUS, Remaja yang Mendapat Imunisasi	90
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di Fasilitas Pendampingan Akreditasi	126.251
		Jumlah Kelembagaan Kabupaten Kota Sehat yang dibina (Forum Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan)	76
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Olahraga	300
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Standar (RS dan Puskesmas)	30
		Jumlah Masyarakat yang di fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemda	43
c.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Kesehatan Terintegrasi SIKN	93.000
d.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS Tipe C dan D Serta Fasyankes yang di Fasilitas Izin	70
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar	85
		Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar	53,33
a.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang di Fasilitas Ijin Praktek	90
b.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesehatan di Fasyankes yang Sesuai Standar (Jenis, Kompetensi, Kualifikasi dan Jenis Pekerjaan)	2.100
c.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesehatan Yang di Fasilitas untuk di Tingkatkan Kompetensi Teknis	215

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang di Tindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	650
a.	Pemberiana Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek dan Toko Obat yang mampu memelihara Persyaratan Perizinan	84
b.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Teretentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT Sesuai Standar	23
c.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Presentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM) memenuhi syarat	82
d.	Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (Golongan A1 dan Gol A2, Gerai Pangan Jajan) memenuhi syarat	82
e.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Pangan IRT yang aman, bermutu dan memenuhi ketentuan	50
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Unit Pelayanan Tingkat Desa/Kelurahan yang memiliki Kader Kesehatan Sesuai Standar	52
a.	Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan dan Kemitraan	12
b.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan GERMAS	1
c.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang difasilitasi	1.146
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	100
		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100
		Persentase Pemenuhan Dokumen Penilaian Manajemen Risiko	100
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan/Dokumen Keuangan Tersusun	100
c.	Adiministrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhab Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100
d.	Administrasi Kepegawaian Pearangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	100
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100
f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diperlukan	100
h.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
		Tahun 2026	
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	134.490.543.828	APBN, APBD
a.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	57.285.700.603	APBN, APBD
b.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.678.370.425	APBN, APBD
c.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	479.912.000	APBN, APBD
d.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.560.800	APBN, APBD
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.113.667.300	APBN, APBD
a.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	21.850.800	APBN, APBD
b.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	54.514.100	APBN, APBD
c.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.037.302.400	APBN, APBD
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	611.582.000	APBN, APBD
a.	Pemberiana Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	260.646.000	APBN, APBD
b.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Teretentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	75.000.000	APBN, APBD

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
		Tahun 2026	
c.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	21.670.000	APBN, APBD
d.	Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0	APBN, APBD
e.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	254.266.000	APBN, APBD
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	268.686.600	APBN, APBD
a.	Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.654.000	APBN, APBD
b.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	APBN, APBD
c.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	218.032.600	APBN, APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	454.920.798.960	APBD
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.099.800	APBD
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	193.917.645.000	APBD
c.	Adiministrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	0	APBD
d.	Administrasi Kepegawaian Pearangkat Daerah	69.760.000	APBD
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.069.868.000	APBD
f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	808.580.160	APBD
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.146.000	APBD
h.	Peningkatan Pelayanan BLUD	258.587.700.000	APBD
Jumlah		592.405.278.688	

Purwodadi, 22 Januari 2026



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN GROBOGAN

 dr. DJATMIKO, M.A.P
 Pembina Tk. I / IVb
 NIP 197110012006041017

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN GROBOGAN



 MUHAMMAD SOLECH, SKM, M. Kes
 Pembina Tk. I / IVb
 NIP 197104071994031003



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

